DAFTAR PUSTAKA

Buku

Devano, Sony, dan Siti Kurnia Rahayu. "Perpajakan: Konsep, teori, dan isu." (2006).

Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 34.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2018), 8-10

Muhammad Muhdar, *Penelitan Doctrinal dan Non-Doctrinal,* (Samarinda: Mulawarman Universty Press, 2019), 12.

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 13-14.

Sugiyono, *Metode Peneitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 5.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 214.

Soemitro, *Asas dan dasar perpajakan*, (Bandung: Eresco Publisher, 1986), 1.

Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 34.

Soerjono Soekano, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 2019), 80.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

Jurnal

Aisyah, Aura. "Timbul dan Hapusnya Utang Pajak," (2023): 1–14.

Arifin. "Landasan Teori." *Dasar-Dasar Ilmu Politik* 2 (2020): 275–76.

Agustini dan Puspita, "Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1), (2024): 168

Awaeh, Maya Angriani, Linda Lambey, dan Pinatik Sherly. "Analisis Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 2268–76. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16529.

Barus Z., "Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.2 (2016)

Bayu Krisnapati, "Direktorat Jenderal Pajak sebagai Penegak Hukum Transformatif di Indonesia: Urgensi Penerapan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan," *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, *1*(1), 41-57, (2019). https://doi.org/10.52869/st.v1i1.7

Cahnyaningsih, D., "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot," *Jurnal Recthsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2020), 1.

Devita Sari Dewi, dkk, “Timbul dan Hapusnya Utang Pajak,” (2024), 1-14.

Erich Kirchler, "The Economic Psychology of Tax Behaviour," *(United States of America: Cambridge University Press,* (2007).

Francis Snyder, "The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Processes, Tools and Techniques", *The Modern Law Review, 56.1* (1993).

Graetz, M. J., & Wilde, L. L. (1985). "The Economics of Tax Compliance: Fact and Fantasy". *National Tax Journal*, *38*(3), 357.

Hanifah, Benita Winda. “Pengaruh *Tax Amnesty , E-Filling* , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Semarang Timur,” 2021.

Karimatul Khasanah, "*Tax Amnesty di Indonesia Sejarah, Dinamika, Analisis Filsafat Hukum Cum Maslahah"* (Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2020),

Karnedi, Nahdah F., dan Amir Hidayatulloh. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan,* 12.1 (2019).

Khoiniyah, Maratus. “Analisis Efektivitas Progam Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty)* dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasuruan,” (2019).

Krisnapati, “Direktorat Jenderal Pajak sebagai Penegak Hukum Transformatif di Indonesia : (Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan).” (2022)

Kuswandari dkk., “Analisis Jenis - Jenis Pajak di Indonesia dan Dampaknya,” *Gunung*

Djati Conference Series, Vol. 56, (2025).

Larasati, Anissa Yuniar, dan Bani Binekas. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1)." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)* 5, no. 1 (2019): 1339–54.

Michael G. Allingham, Agnar Sandmo, "Income tax evasion: a theoretical analysis*,"* *Journal of Public Economics*, *1.3–4*, (2019). https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2.

Misra, F., "Tax Compliance: Theories, Research Development And Tax Enforcement Models," *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, 3.2 (2019)

Rohmah dan Zulaikha, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Studi Kasus Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri*),"* *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(4), (2023).

Rumbewas, Rumpi, dan Ingra Sovita. "Analisis Penerapan *Tax Amnesty* dalam Rangka Meningkatkan." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 1, no. 4 (2024): 454–64. https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index.

Safi'ah, E. U. "Analisis efektivitas penerapan Program pengampunan pajak (*Tax Amnesty)* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo". (2018).

Siamena, dkk., "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado," *Jurnal Riset Akuntansi*

Going Concern, 12(2), 2017.

Unikom. “Utang Pajak,” 2023.

WN, Santy Fitnawati, Asep Sunarya, Surya Riyanto, dan Wahyu Rivaldi. “Hutang Pajak.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 223–31.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-151/PJ/2021 tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Tugas Seksi Pengawasan

Website

Asmarani N. (03 Februari 2025). *Apa itu surat keputusan pembetulan*. Dari https://news.ddtc.co.id/ apa-itu-surat-keputusan-pembetulan. Diakses pada 19 Oktober 2025.

Badan Pusat Statistik, *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah).* Dari https://www.bps.go.id/id/statistic-table. Diakses pada 28 Februari 2026.

Direktorat Jenderal Pajak. *Amnesti Pajak.* Dari https://www.pajak.go.id/id/amnesti-pajak-10. Diakses pada 28 September 2025.

Direktorat Jenderal Pajak. *Data Statistik Tahun 2011-2015*. 2015

Direktorat Jenderal Pajak. *Penagihan*. Dari https:// www.pajak.go.id/id/penagihan. Diakses pada 17 Oktober 2025.

Direktorat Jenderal Pajak. *Mengenal Upaya Hukum Pajak di Indonesia*. Dari https://www.pajak.go.id/ mengenal-upaya-hukum-pajak-di-indonesia. Diakses pada 30 Januari 2026.

Direktorat Jenderal Pajak. *Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan.* Dari https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/saat-dimulainya-kewajiban-perpajakan. Diakses pada 3 November 2025.

Firmansyah R. (27 Agustus 2025). M*engenal Utang pajak: definisi, jenis, penyebab, dan solusinya.* Dari https://www.idntimes.com/business/economy/mengenal-utang-pajak. Diakses pada 19 Oktober 2025.

Fitriya. (2 Desember 2024). *Mengenal Utang Pajak, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian.* Dari https://klikpajak.id/mengenal-utang-pajak/. Diakses pada 3 November 2025.

Hidayat. F. (17 Maret 2025). *Kebijakan Penghapusan Sanksi, Wujud Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak*. Dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/kebijakan-penghapusan-sanksi-wujud-keadilan-dan-kepastian-hukum-bagi-wajib-pajak. Diakses pada 28 September 2025.

Pinatih, E. (17 Januari, 2022). P*PS bukan Tax Amnesty Jilid 2.* Direktorat Jenderal Pajak. Dari https://pajak.go.id/id/artikel/pps-bukan-tax-amnesty-jilid-2. Diakses pada 20 Agustus 2025.

Pratama, S. (22 September 2016). *Ini Enam Aturan Repatriasi dan Gateway Dalam Tax Amnesty yang Disempurnakan*. Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-enam-aturan-repatriasi-dan-gateway-dalam-tax-amnesty-yang-disempurnakan. Diakses 30 Desember 2025.

Rahman, A**.,** n.d. "*Kepatuhan Pajak di Indonesia : Sebuah Tinjauan Teoritis - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia"* Dari https://ikpi.or.id/en/kepatuhan-pajak-di-indonesia-sebuah-tinjauan-teoritis. Diakses pada 30 Desember 2025.

Siddharta P. (2025). *Tax Amnesty Jilid III: Pilihan Logis atau Sekadar Ilusi Kebijakan?.ikatan konsultan pajak indonesia (IKPI).* Dari Tax Amnesty Jilid III: Pilihan Logis atau Sekadar Ilusi Kebijakan? Diakses pada 19 Oktober 2025.

Wiangga S., (15 Maret 2017), *Target Penerimaan Pajak di DJP Jateng I Justru Menurun.* https://semarang.bisnis.com/read/20170315/536/770468/target-penerimaan-pajak-di-djp-jateng-i-justru-menurun. Diakses pada 18 Maret 2026.

Wisnu S. (10 Januari 2024), P*ajak dan Kesinambungan dalam Stabilitas Ekonomi.* Direktorat Jenderal Pajak. Dari https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-kesinambungan-dalam-stabilitas-ekonomi. Diakses pada 1 Maret 2026.